

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (SMK3)
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Oleh : Oni Imas Anita, FIS, UNY(oni.imasanita@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 Kabupaten Temanggung sebagai perwujudan dari penerapan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber. Teknik analisis data secara interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 di Temanggung belum efektif. Pengawasan penerapan SMK3 oleh pemerintah dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana kerja, 2) Pemeriksaan di perusahaan, 3) Penindakan korektif secara preventif dan represif, dan 4) Pelaporan hasil pemeriksaan. Hambatan penerapan SMK3 dari perusahaan yaitu 1) Keterbatasan Anggaran, 2) Keterbatasan SDM, 3) Kemampuan perusahaan yang berbeda-beda. Sedangkan hambatan yang ditemui pengawas ketenagakerjaan adalah 1) Kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan dan; 2) belum adanya instrumen khusus pengawasan SMK3.

Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah, SMK3.

GOVERNMENT SUPERVISION OVER THE APPLICATION OF HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMK3) OF TEMANGGUNG DISTRICT

Abstract

This research aims to find out the government supervision against the implementation of SMK3 in Temanggung District. This study employed descriptive qualitative approaches. The data sources were primary and secondary data. The data collection techniques were interview, observation, and documentation. The data analytical validity used the source triangulation. The data analytical technique is interactive technic according to Miles and Huberman. The result showed that the supervision against the implementation of SMK3 in Temanggung was not effective. The implementation of SMK3 was supervised by the government through Dept. of Manpower and Transmigration Temanggung District by measuring as follows: 1) work plan arrangement, 2) company inspection 3) preventive and repressive corrective operation, and 4) inspection result report. The obstacles of SMK3 implementation from the company are (1) limited budget, (2) limited human resources, (3) different companies ability. Meanwhile, the hindrances from the

government are (1) lack of supervisor staff (2) the absence of special instruments for SMK3 supervision.

Keynote : Supervision , The Government , SMK3.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan pasar bebas WTO (*World Trade Organization*) dan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang akan berlaku tahun 2020, Indonesia sebagai negara berkembang kini bersiap untuk menghadapi pasar bebas dengan memperkuat sektor ekonomi melalui pembangunan industri. Pembangunan industri tersebut bertujuan agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi dan memperluas kesempatan kerja (ghozaliq.com/2013/09/13/tujuan-pembangunan-industri/). Melalui pembangunan industri tersebut maka saat ini banyak bermunculan perusahaan industri seperti industri manufaktur, industri otomotif, industri elektronik dan industri lainnya yang berskala kecil hingga besar.

Terkait dengan perkembangan industri yang semakin pesat, guna mengembangkan dan menjamin jalannya perindustrian maka pemerintah mengatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan aspek utama penggerak roda produksi dalam sebuah perusahaan. Sehingga pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan bagi pekerja melalui pembuatan undang-undang yang dapat menjamin mereka bekerjadengan aman, selamat, dan produktif.

Masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam

industri secara keseluruhan. Oleh karena itu pola-pola yang harus dikembangkan di dalam penanganan bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan pengadaan pengendalian potensi bahaya, harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Perbuatan tidak aman (*unsafe act*) maupun keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) berakar lebih dalam daripada kecelakaan yang terlihat atau dialami.

Dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan SMK3 disebutkan bahwa pemerintah berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ditujukan untuk menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah guna melindungi pekerja dan mengawasi jalannya perusahaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dari tingkat

nasional sampai tingkat provinsi. Pada tingkat nasional pengawasan dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja sedangkan pada tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pada dasarnya pengawasan SMK3 merupakan sub bagian dari pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun terdapat perbedaan yang mendasar terletak pada pengawasan SMK3 dilakukan juga oleh auditor SMK3. Audit SMK3 dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal audit dilaksanakan oleh perusahaan/pengurus sedangkan pada audit eksternal dilakukan oleh Badan Auditor yang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Audit SMK3 ini membutuhkan biaya yang besar sehingga hal ini menjadi persoalan bagi banyak perusahaan dalam menerapkan SMK3. Sehubungan dengan fungsi pengawasan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada tindakan pemberian sanksi belum berjalan efektif karena pemerintah melihat dampak yang besar jika sanksi berjalan sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan.

Dari beberapa hal tersebut inilah yang menjadi latar belakang peneliti ingin mengetahui pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 dan faktor penghambat penerapan SMK3 dengan judul “ Pengawasan Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kabupaten Temanggung”.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari berbagai organisasi bahwa semua kegiatan yang dicapai sesuai dengan rencan selanjutnya. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali. Dalam Manullang (2005:172) disebutkan bahwa fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Menurut Kadarman dalam Mangkunegara (2002 :161) pengawasan yang baik dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu langkah-langkah proses pengawasan yaitu: (1) Menetapkan Rencana / Standar, (2) Mengukur Kinerja, (3) Memperbaiki Penyimpangan. Ketiga tahapan tersebut harus dijalankan secara maksimal agar tujuan dari pengawasan dapat tercapai.

Untuk melihat pengawasan penerapan SMK3 yang dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung peneliti menggunakan teori langkah pengawasan oleh Kadarman tersebut sehingga dapat diketahui tahapan-tahapan dalam pengawasan penerapan SMK3 apakah sudah berjalan maksimal atau belum.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan/mendesripsikan pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Temanggung terhadap SMK3 dan melihat faktor penghambat SMK3 di CV. Prima Karya Abadi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung dan CV. Prima Karya Abadi pada 5 Desember 2014 sampai 31 Januari 2015.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibu Dimitri Oki Kusuma Dewi, SH, Pengawas Ketenagakerjaan dari Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Dinaskertrans Kab. Temanggung
2. Ibu Sri Rahayu, SE, Pengawas Ketenagakerjaan dari Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Dinaskertrans Kab. Temanggung
3. Bapak Manda Kartiko, S.STP, M.Kom, Kepala Unit Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4. Bapak Dadang Manajer Pelaksana CV. Prima Karya Abadi
5. Bapak PR karyawan CV. Prima Karya Abadi
6. Bapak RWS karyawan CV. Prima Karya Abadi
7. Bapak S karyawan CV. Prima Karya Abadi
8. Ibu SW karyawan CV. Prima Karya Abadi

9. Bapak MA karyawan CV. Prima Karya Abadi

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu :

1. Data primer
Data primer diperoleh dari wawancara.
2. Data sekunder
Data pelengkap yang didapat dari penelitian di lapangan.

Instrumen Penelitian

Didalam sebuah penelitian dibutuhkan beberapa instrumen untuk mendapatkan data yang valid (Moleong, 2007:168). Peneliti sebagai instrumen berperan sebagai alat yang berupaya memahami pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Validasi dilakukan peneliti sendiri dengan melalui evaluasi diri tentang pemahaman mengenai kajian teori pengukuran efektivitas dan efektivitas kebijakan publik, desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif serta wawasan terhadap bidang yang diteliti yaitu pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi. Untuk itu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara

3. Dokumentasi

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan triangulasi untuk mendapatkan data yang valid, yakni Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Analisis induktif diterapkan untuk membantu tentang pemahaman pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema yang diikhtisarkan dari data kasar (Lexy J. Moleong 207-209). Proses analisis dilakukan melalui empat alur kegiatan :

1. Reduksi data
2. Kategorisasi
3. Display data
4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung (Disnakertrans)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung (Disnakertrans) merupakan pelaksana teknis dari Pemerintah Kabupaten Temanggung di bidang Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Gajah Mada No. 78 Temanggung. Dinas ini satu kompleks dengan BLK (Balai Latihan

Kerja). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung mempunyai Struktur/Susunan yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, 4 (empat) Sub Dinas, 1 (satu) kelompok jabatan fungsional, 2 (dua) bidang, 7 (tujuh) Seksidan 1 (satu) UPTD BLK.

2. CV. Prima Karya Abadi

CV. Prima Karya Abadi adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kayu. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Maron Kandangan, Kedungkumpul, Kandangan Temanggung. CV. Prima Karya Abadi memiliki 156 karyawan yang terdiri dari 74 karyawan wanita dan 82 karyawan laki-laki dibagi dalam beberapa bidang kerja. CV. Prima Karya Abadi merupakan perusahaan besar yang wajib menerapkan SMK3 namun CV. Ini belum mampu menerapkan SMK3 karena berbagai hambatan yang ditemui.

Deskripsi Kebijakan

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 merupakan landasan dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Peraturan Presiden No. 21 tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi

dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3, dijabarkan bahwa SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 27 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Pembina, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati dan Pengawas Ketenagakerjaan.

Diskripsi Data Penelitian

Pengawasan Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dinas yang terletak di Temanggung dengan peran yang disandangnya sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah khususnya di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, memiliki peran yang sangat besar terutama dalam penanganan urusan tenaga kerja dan transmigrasi serta pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja maupun pencari kerja.

Pada unit Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans dapat dilihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas dalam menjamin pelaksanaan undang-undang guna melindungi tenaga kerja.

Diketahui bahwa pengawasan penerapan SMK3 merupakan bagian dari pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki beberapa langkah pengawasan yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kerja

Dalam perencanaan kerja, pengawas membuat jadwal pemeriksaan kepada setiap perusahaan yang ada di Temanggung. Pengawas menentukan waktu pemeriksaan, dan melihat jumlah perusahaan bertambah atau berkurang serta melihat kekurangan perusahaan yang sering dijumpai saat pemeriksaan pada tahun sebelumnya.

2. Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja

Pada tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang berada di Kabupaten Temanggung sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) perusahaan, dan diketahui bahwa baru 2 perusahaan yang menerapkan SMK3 dari 40 perusahaan besar yang ada.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan penerapan SMK3 dapat dilakukan melalui pengawasan ketenagakerjaan yang dapat dilihat dalam indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena sampai saat ini belum ada instrumen /pedoman khusus dari pemerintah tentang pengawasan penerapan SMK3.

Objek pengawasan oleh petugas pengawas Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Temanggung antara lain : (1) Jenis usaha perusahaan, (2) Data umum perusahaan, (3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat, (4) Hubungan kerja, (5) Pelaksanaan Pengupahan, (6) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek/BPJS), (7) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pada objek pemeriksaan K3 dapat dilihat sejauhmana perusahaan memberikan komitmen untuk menyelenggarakan jaminan perlindungan kerja dan penerapan SMK3. Pada objek pengawasan K3 terdapat beberapa indikator yang diawasi yaitu : Keselamatan kerja umum, keselamatan kerja mekanik dan listrik, kesehatan kerja, kecelakaan kerja, penanggulangan kebakaran dan konstruksi bangunan, dan keselamatan kerja uap dan bahan kimia berbahaya.

Selama proses pemeriksaan, pengawas akan bertanya kepada HRD dan karyawan perusahaan. Jika terdapat pelanggaran yang ditemukan maka pengawas akan memberikan teguran lisan saat pemeriksaan berlangsung. Hal tersebut dikuatkan dari hasil penelitian di CV. Prima Karya Abadi saat pengawas melakukan pemeriksaan.

3. Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif

Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung akan melakukan penindakan secara preventif dan represif apabila pada saat pengawasan dan pemeriksaan pengawas tersebut

menemukan pelaksanaan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja adapenyimpangan. Penindakan korektif secara preventif dan represif tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung namun untuk tindakan represif sampai tahun 2014 belum maksimal karena baru sampai pada sanksi tertulis belum pada tahap tindakan yang dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan pelanggar ketentuan. Penindakan korektif secara preventif dilakukan dengan pembinaan secara lisan kepada HRD maupun karyawan sedangkan penindakan korektif represif dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada perusahaan. Belum optimalnya pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut karena menurut pihak dinas dan pemerintah, pemberian sanksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan resiko yang akan didapatkan, terutama masalah tenaga kerja dan ekonomi pekerja.

4. Pelaporan hasil pemeriksaan

Setelah pengawas selesai melakukan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan diuraikan ke dalam kartu pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung untuk ditindak lanjuti secara terus menerus apabila perusahaan tersebut belum melaksanakan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja . Selanjutnya hasil laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Temanggung untuk disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kabupaten Temanggung.

Hasil pemeriksaan akan diterbitkan dalam nota pemeriksaan yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan sehingga perusahaan dapat memperbaiki kekurangannya dan memberikan pertanggungjawaban atas hasil pemeriksaan tersebut kepada Disnakertrans.

Selain pengawasan yang dilakukan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan bimbingan atau pembinaan kepada perusahaan. Bimbingan tersebut antara lain : (1) Bimbingan mengenai pencegahan kecelakaan kerja, (2) Bimbingan kesehatan kerja, (3) Bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan (4) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pada bimbingan penerapan SMK3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sosialisasi yang dilaksanakan antara lain dinas memberi pemahaman tentang SMK3, pelaksanaannya, syarat pelaksanaan dan menetapkan perusahaan yang harus menerapkan SMK3. Melalui sosialisasi SMK3 yang digalakkan pada tahun 2015 diharapkan pada tahun tersebut perusahaan yang belum menerapkan SMK3 sudah bisa mempersiapkan penerapan SMK3.

Hambatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Terdapat berbagai hambatan penerapan SMK3 yang banyak dijumpai pada perusahaan-perusahaan besar di Temanggung, salah satunya CV. Prima Karya Abadi. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya adalah :

a. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting untuk menentukan terselenggaranya program atau kegiatan, terlebih lagi dalam pelaksanaan SMK3 yang membutuhkan biaya besar untuk audit SMK3 dan pengembangan kemampuan pekerja. Banyak perusahaan yang belum mampu menyediakan anggaran untuk syarat penerapan SMK3, hal tersebut juga dialami oleh CV. Prima Karya Abadi.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan SMK3 di CV. Prima Karya Abadi terkendala oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten. Berdasarkan latar belakang pendidikan, banyak karyawan yang hanya lulusan SMP dan SMA bahkan ada pula yang lulusan SD sehingga karyawan belum paham tentang manfaat ataupun tujuan dari penerapan SMK3.

c. Kemampuan perusahaan yang berbeda-beda

Setiap perusahaan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan ini seperti pada pembiayaan, tenaga kerja, besarnya perusahaan, jumlah karyawan ataupun lamanya perusahaan berdiri. Hal tersebut berpengaruh terhadap

siap atau tidaknya perusahaan menerapkan SMK3. Pada perusahaan yang baru beroperasi maka akan sulit untuk menerapkan SMK3 seperti halnya CV. Prima Karya Abadi yang baru beroperasi selama 2 tahun, sehingga masih memerlukan waktu untuk penerapan SMK3 secara keseluruhan.

Sedangkan faktor penghambat dari pihak pengawas adalah :

- a. Kurangnya jumlah pengawas ketenagakerjaan

Diketahui bahwa pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung sebanyak 4 orang dengan perusahaan yang harus diperiksa sebanyak 240 perusahaan, jadi setiap seorang pengawas melakukan pemeriksaan kepada 60 perusahaan selama satu tahun. Hal ini tentu kurang efektif karena dengan banyaknya perusahaan dan tenggang waktu yang relatif singkat mengharuskan pengawas bekerja dengan cepat sedangkan objek yang harus diawasi cukup banyak dan rumit. Sehingga kekurangan petugas pengawas menjadi salah satu faktor penghambat kurang efektifnya pengawasan penerapan SMK3.

- b. Belum adanya instrumen khusus pengawasan SMK3 dari pemerintah

Penerapan SMK3 telah diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Namun masih kurang diperjelas dengan belum adanya instrumen pengawasan bagi pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan penerapan

SMK3. Sehingga sampai saat ini untuk pengawasan penerapan SMK3 masih menggunakan instrumen dari pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan salah satu tugas utama yang dipegang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan melalui beberapa tahap yaitu 1) tahap penyusunan rencana, 2) tahap pemeriksaan perusahaan atau tempat kerja, 3) tahap penindakan, 4) tahap pelaporan hasil pemeriksaan. Dari keempat tahapan tersebut, telah dijalankan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung namun masih kurang efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengawasan melalui tahapan yang sama dengan teori Kadarman (2001: 161) sebagai berikut:

1. Menetapkan standar atau dasar pengawasan

Menetapkan rencana pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertras sebagai alat ukur proses pengawasan. Hal ini sesuai dengan teori Mangkunegara (2002:186) yang menyatakan bahwa menetapkan standar dalam perencanaan harus memenuhi beberapa hal, yakni 1) alat penilai (standar) ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, 2) mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan dan 3) mengerti benar apa yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam penyusunan rencana pegawai pengawas akan melihat kerangka kerja tahunan, dan menggunakan pedoman pemeriksaan berupa

kartu pemeriksaan ketenagakerjaan. Kendala yang dialami pengawas dalam proses perencanaan adalah penetapan waktu pemeriksaan yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Mengukur pelaksanaan

Setelah rencana disusun maka tahap pengawasan selanjutnya adalah mengukur pelaksanaan atau menilai. Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, untuk mengukur pelaksanaan/penilaian keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yakni dengan pemeriksaan langsung di perusahaan atau di tempat kerja. Mangkunegara (2002:188) menjelaskan bahwa pemeriksaan langsung lebih efektif dari pada pemeriksaan melalui laporan tertulis.

Pada tahap ini pengawas membandingkan keadaan senyatanya di perusahaan atau tempat kerja dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di perusahaan-perusahaan untuk mengukur pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan, Disnakertrans juga melakukan berbagai bimbingan ketenagakerjaan kepada perusahaan dengan maksud memberikan tambahan pengetahuan tentang ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan juga agar tenaga kerja mendapat pemahaman dan jaminan perlindungan kerja dari masing-masing perusahaan tempat mereka bekerja.

3. Memperbaiki penyimpangan

Langkah terakhir dari pengawasan ini dilaksanakan bila pada langkah sebelumnya telah dipastikan terdapat penyimpangan. Dengan

tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pengawasan yang menyimpang dengan standar atau aturan yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-tama menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Bila penyebab penyimpangan sudah diketahui dengan pasti barulah mengambil tindakan perbaikan.

Dalam hal perbaikan penyimpangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui penerbitan nota dan akte pemeriksaan telah menjabarkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan beserta sanksi yang dapat dikenai kepada perusahaan.

Perbaikan penyimpangan melalui pemberian sanksi oleh pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi lisan/teguran kepada perusahaan yang belum menerapkan SMK3.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang Pengawasan Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kabupaten Temanggung, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Temanggung pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan dengan Unit Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan pemerintah terhadap penerapan SMK3 di Temanggung belum berjalan efektif, hal tersebut dilihat dari tahapan pengawasan yang belum berjalan efektif dan terdapat berbagai faktor penghambat penerapan SMK3.

1. Pengawasan SMK3 merupakan bagian dari Pengawasan Ketenagakerjaan karena belum memiliki instrumen khusus pengawasan SMK3. Pengawasan tersebut dilakukan melalui empat tahapan yaitu sebagai berikut: a) Penyusunan rencana kerja, b) Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja, c) Penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif, dan d) Pelaporan hasil pemeriksaan. Tahapan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya penerapan SMK3 di Temanggung sebagai berikut:
 - a. Faktor penghambat dari perusahaan yaitu (1) Keterbatasan anggaran, (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, (3) Kemampuan perusahaan yang berbeda-beda.
 - b. Faktor penghambat dari pemerintah khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah (1) Kurangnya jumlah pengawas

ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung, (2) Belum adanya instrumen khusus pengawasan SMK3 dari pemerintah.

Terdapat 40 perusahaan besar yang wajib menerapkan SMK3 namun baru 2 perusahaan yang sudah menerapkan. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang belum menerapkan SMK3 masih pada tingkatan sanksi berupa teguran dan sanksi tertulis sehingga pengawasan ketenagakerjaan kurang optimal karena pada tahap penindakan belum berjalan secara efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran terkait dengan Pengawasan Pemerintah terhadap Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kab. Temanggung, yaitu:

1. Pemberian sanksi harus lebih dipertegas jika terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran, sehingga perusahaan akan menindak lanjuti sanksi yang diberikan dengan langkah perbaikan.
2. Memperbanyak sosialisasi tentang penerapan SMK3 dan pentingnya perlindungan tenaga kerja sehingga pemahaman perusahaan dan tenaga kerja tentang SMK3 dan perlindungan tenaga kerja semakin baik.
3. Pengusaha hendaknya menyediakan alat perlindungan diri disesuaikan dengan jumlah pekerja dan memberikan fasilitas

- pelayanan perlindungan tenaga kerja kepada seluruh pekerja tanpa terkecuali pada perusahaan kecil dan perusahaan menengah.
4. Pengusaha harus ikut menegakkan peraturan K3 dan peraturan ketenagakerjaan agar tenaga kerja juga mengikuti aturan yang telah ditentukan.
 5. Hendaknya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan agar jalannya pengawasan dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Anwar Prabu Mangkunegara .2002 *.Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bannet N.B Silalahi dan Rumondang B. Silalahi.1995. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.Jakarta : PT. PustakaBinamanPressindo.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Manullang. 2005. *Dasar-Dasar Manjemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Malayu S.P Hasibuan , Drs. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mutiara S. Panggabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2013. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rudi Suardi. 2005. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*.Jakarta: PPM.
- Silalahi, Bennet N.B dan Rumondang B. Silalahi. 1991. *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PPM.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 27 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Audit SMK3*,Edisi I. Jakarta : Direktorat Pengawasan Keselamatan KerjaDitjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjajaan.
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).2008. *Pengawasan Ketenagakerjaan Panduan Untuk Pengusaha*.
- M. Kautzar Riski Saifullah. (2008). Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.

Titi Syartini. (2010). Penerapan SMK3 Dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT. Indofood CBS Sukses Makmur Divisi Noodle Cabang Semarang. Penelitian Khusus. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

ghozaliq.com/2013/09/13/tujuan-pembangunan-industri/ diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 13.00 WIB

(<http://ergonomi-fit.blogspot.com/2011/03/hambatan-dalam-penerapan-k3-dan.html>)
Diakses pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 13.00 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB.

<http://www.temanggungkab.go.id/files/rpjmd20132018/bab2/angkapartisipasiangkatankerja.pdf> diunduh 13 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB.

<http://ekbis.sindonews.com/read/836859/34/192-911-peserta-jamsostek-alami-kecelakaan-kerja> diakses 13 Oktober 2014 pukul 16.00 WIB